
Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja)

Agyztia Premana¹, Hendri Sucipto², Agung Widiatoro³

a.premana@umus.ac.id¹, hendrisucipto313@gmail.com², agungwnz123@gmail.com³

^{1,2,3}Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

Abstract: *Pengabdian tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung titik sentral pembangunan nasional. Desa Tegalreja yang terletak diKecamatan Tegalreja Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desadesa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Tegalreja dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Tegalreja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Tegalreja sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Tegalreja dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Tegalreja telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebar di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Tegalreja dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa.*

Keywords: *Desa, Pelayanan Prima, Digital*

Pendahuluan

Kajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan dewasa ini. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 dan dipertegas oleh PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan tentang desa tersebut melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa.

Perhatian pembangunan Indonesia sejatinya perlu diarahkan dengan berorientasi pada pembangunan desa, karena sebagian wilayah Indonesia meliputi wilayah perdesaan. Selama ini pembangunan cenderung berorientasi dan bias kota. Sumber daya yang ada di desa diambil sehingga menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota, kemiskinan, keterbelakangan menjadi hal yang selalu melekat di desa. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan desa-kota. Pemerintah idealnya mau dan memampukan desa, bahwa desa dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Di masa kini desa dianggap mampu berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa. Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Terlebih dengan dukungan yang besar dari Pemerintah, berupa Dana Desa (DD), dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya (Pasal 72 UU Desa), yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 UU Desa).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin di Indonesia mendiami kawasan perdesaan. Rendahnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan disebabkan antara lain oleh penyebaran sumber daya ekonomi yang tidak merata antara desa dan kota. Pada bulan September (BPS,2018) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,14 juta (7,02%) sedangkan perdesaan sebanyak 15,81 juta (13,20%), Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan sebesar 1,24 sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan perdesaan sebesar 2,43, dan Indeks Keparahan Kemiskinan perkotaan sebesar 0,30 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan perdesaan sebesar 0,65.

Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antar wilayah

<https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>

yang memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi masalah serius. Berdasarkan hasil pendataan IDM (Indeks Desa membangun) menunjukkan tingkat pembangunan desa dilabel dengan status tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Kemudian hasil pengkategorian IPD (Indeks Potensi Desa) menghasilkan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen). Dalam periode 2015- 2019 jumlah desa tertinggal memang telah meningkat banyak statusnya menjadi desa berkembang dengan asumsi pembangunan desa atas amanat Undang-Undang Desa telah dilaksanakan dengan baik, namun jika kita telaah lebih lanjut lagi jumlah desa mandiri hanya sekitar 7% saja, artinya hanya sedikit sekali desa maju yang naik statusnya menjadi desa mandiri.

Desa Tegalreja sendiri model atau program pemberdayaan yang secara aktif melibatkan pemuda desa Tegalreja belum sepenuhnya efektif dilakukan, seperti pemerintah desa pernah melakukan program kerja sama dengan pihak swasta/industri dalam peningkatan sumber daya dan lapangan kerja. Namun belum mampu mengatasi masalah sosial yang ada serta meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam program pembangunan desa. Dalam Pemanfaatan Media Sosial seperti facebook, dan whatsapp sangat membantu dalam hal berkoordinasi, sosialisasi program desa, serta masalah desa teratasi dengan cepat terutama dalam memenuhi pelayanan pada masyarakat. Di samping tersedianya fasilitas internet dan Wifi sudah tersedia dengan daya kecepatan 10 mpbs - 100 mpbs melengkapi pekerjaan perangkat desa dalam bekerja. Fasilitas internet dan Wifi pun dapat diakses oleh masyarakat setempat secara gratis. Teknologi menciptakan inforimpaasi diakses lebih cepat, transparansi serta efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan prima, pelaksanaan program desa, dan pengentasan permasalahan desa. Hal tersebut juga sejalan dalam bagaimana desa menghadapi revolusi industri 4.0.

Sebagai sarana penunjang pelayanan Desa Tegalreja memiliki mobil Maskara (Mobil Aspirasi Kampung Juara) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi bagi Desa Mandiri dan Desa Juara. Bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan multifungsi yang di dalamnya memiliki perangkat lengkap mulai dari sound system, infokus, tangga, kursi lipat serta bisa digunakan untuk masyarakat desa yang sakit (ambulance)dll. Mobil Maskara tersebut digunakan Desa Tegalreja guna mensosialisasikan program, kegiatan

desa serta hal darurat yang terjadi di masyarakat desa. Mobil maskara tersebut diinisiasi ke depan untuk memudahkan pelayanan masyarakat, jemput bola atas kebutuhan masyarakat desa dalam upaya memberikan pelayanan prima.

Menelisik berdasar segi ekonomi, bahwasanya Desa Tegalreja memiliki pasar yang dikelola secara mandiri dan merupakan potensi pemasukan Pendapatan Anggaran Desa (PADes). Selain itu Desa Tegalreja memiliki tanah bengkong seluas seluas $\pm 13,230$ Ha dan Tanah Titi sara seluas $\pm 11,900$ Ha yang menjadi salah satu sumber pemasukan PADes. Pengelolaan pasar desa secara optimal dan berkala tersebut selain menjadi sumber pendapatan desa. Letaknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan menjadikan perputaran ekonomi di pasar tradisional Tegalreja sudah menggunakan digitalisasi keuangan, seperti penggunaan mesin EDC, Mini ATM, Gopay, OVO dan lainnya, sedikit banyak akan mempengaruhi pedagang dalam aktivitas perekonomiannya. Pedagang dengan sendirinya mengupgrade system pengelolaan keuangannya.

Kantor desa telah menyediakan komputer desktop sebagai upaya implementasi teknologi, namun pegawai tidak selalu menggunakan dalam memberikan pelayanan. Justru lebih memilih menggunakan kertas sebagai media pembuatan surat menyurat. Berdasarkan wawancara dengan Pak Suwanto (Kaur Pemerintah, pegawai yang sedang bertugas), menyampaikan bahwa komputer yang tersedia turut membantu pekerjaannya, namun kendala yang dialami adalah: (1) Sistem Informasi e-Desa sudah tersedia, namun masih terkendala dalam ke-stabilan akses Internet (Santoso et al., 2019); (2) Komputer yang tersedia berupa desktop, sehingga tidak praktis, dalam ukuran, daya yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan; (3) Data masyarakat tersedia dalam Internet, bilamana akan membutuhkan data tersebut, harus datang ke kantor dan mengaktifkan komputer; (4) Sampai saat ini, daya listrik yang tersedia belum stabil sepenuhnya, hal ini dibuktikan komputer yang tersedia sering mengalami kerusakan karena faktor listrik; (5) Asupan daya relatif lebih besar, walaupun monitor telah diganti menjadi LCD, hal ini turut mempengaruhi kenaikan biaya beban pemakaian listrik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan.

Ketersediaan layanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan dan kemudahan dalam hal akses pelayanan publik. Selain kemudahan dalam pelayanan publik juga terdapat kemudahan dalam penyampaian pengaduan masyarakat yang tersedia melalui online. Transparansi tata kelola menjabarkan terkait jenis media yang di sediakan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan mekanisme keterbukaan program perencanaan. Secara umum smart government identik dengan penerapan e-government atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewedahi aspirasi masyarakat.

Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Tegalreja terbilang sudah melangkah maju, karena memiliki program inovatif dalam memajukan BUMDES tersebut. BUMDES meluncurkan program pinjaman modal usaha saja secara berkala dan terbatas kepada masyarakat. Ke depan BUMDES tidak sebatas memberikan pinjaman modal usaha, namun sedang berusaha bersinergi sehingga dapat memajukan dan memasarkan produk lokal masyarakat hasil UMKM desa dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh warga desa melalui smart phone-nya masing-masing dengan cara bekerja sama dengan Universitas Muhadi Setiabudi yakni Prodi Teknik Informatika Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan ekonomi desa melalui konsep smart village.

Pengembangan ekonomi di desa Ponggok dilakukan dengan melakukan inovasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada dan bertindak out of the box dalam pengelolaannya. Selain itu, dalam pengelolaan BUMDes juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi melalui platform media sosial. Satu hal yang selama ini kerap dilupakan pengurus BUMDes lain dalam mempromosikan potensi wisata yang dimilikinya, yaitu tidak menggunakan media sosial sebagai media promosi untuk menjangkau khalayak luas. Mengutip data Tomato Digital Indonesia, dari total 268 juta penduduk pada awal 2019, pengguna internet aktif sudah tembus 150 juta orang atau 56 persen populasi (Websindo 2019). Adapun 142,8 juta orang diketahui sebagai pengguna internet yang mengakses dari ponsel. Selanjutnya, terdapat sekitar 150 juta orang memiliki akun medsos, yang 130 juta orang mengakses medsos dari ponsel (Putra 2019). Dari data ini, dapat diambil kesimpulan promosi di medsos memegang peranan sangat penting bagi

sebuah BUMDes ketika ingin mengenalkan lokasi wisata yang potensial kepada banyak orang.

Program smart village dinilai dapat memberikan kemudahan dalam integrasi data sehingga dapat diterapkan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan perekonomian desa melalui BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang berbasis pada program smart village akan mewujudkan suatu desa cerdas yang berbasis digital, dengan masyarakat desa yang cerdas. Masyarakat yang cerdas dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan menghasilkan ekonomi yang cerdas dengan berbagai inovasi dan kreasi sehingga meningkatkan produktivitas.

Metode

Pembangunan desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi reposisi kewenangan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dan menjadi bagian dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa. Teknologi informasi menjadi alat selain untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Teknologi informasi mempertemukan berbagai kepentingan untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa.

Metode pelaksanaan kegiatan implementasi smart village di Desa Tegalreja dengan diagram dibawah ini. Metode Pelaksanaan Identifikasi permasalahan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan aparatur desa dilanjutkan dengan observasi ke lapangan. Hasil identifikasi permasalahan yang telah diperoleh adalah:

1. Ketersediaan akses internet yang tidak stabil di seluruh desa; kedua, akses Internet tidak merata di seluruh desa;
2. Belum tersedia aplikasi administrasi kependudukan;
3. Belum tersedia portal desa;

Solusi di berikan dalam kerangka implementasi smart village, yang mencakup

pelatihan membuat koneksi dedicate point to point, pelathan pembuatan akses point dan penyebarannya, pelatihan pembuatan dan penggunaan aplikasi kependudukan, pelatihan pembuatan dan pengisian content website. Pelaksanaan Pengabdian ini merupakan bagian dari pengabdian pengembangan desa mitra yang telah dilakukan para narasumber/dosen bersama tim di Desa Tegalreja, fokus pengabdian yang dilakukan adalah tentang peningkatan profesionalitas layanan aparatur elektronik bagi pegawai.



Gambar 1. Struktur Smart Village.

Pembahasan

Pengembangan ekonomi di desa Pongkok dilakukan dengan melakukan inovasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada dan bertindak out of the box dalam pengelolaannya. Selain itu, dalam pengelolaan BUMDes juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi melalui platform media sosial. Satu hal yang selama ini kerap dilupakan pengurus BUMDes lain dalam mempromosikan potensi wisata yang dimilikinya, yaitu tidak menggunakan media sosial sebagai media promosi untuk menjangkau khalayak luas. Mengutip data Tomato Digital Indonesia, dari total 268 juta

penduduk pada awal 2019, pengguna internet aktif sudah tembus 150 juta orang atau 56 persen populasi (Websindo 2019). Adapun 142,8 juta orang diketahui sebagai pengguna internet yang mengakses dari ponsel. Selanjutnya, terdapat sekitar 150 juta orang memiliki akun medsos, yang 130 juta orang mengakses medsos dari ponsel (Putra 2019). Dari data ini, dapat diambil kesimpulan promosi di medsos memegang peranan sangat penting bagi sebuah BUMDes ketika ingin mengenalkan lokasi wisata yang potensial kepada banyak orang.

Berbagai usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa akan lebih mampu memberikan BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Volume 6 Nomor 4, November 2021 867 kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat. Selain itu, kunci dari suksesnya konsep smart village adalah dengan menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya smart village ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien, dan sustainable.

Berbagai usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa akan lebih mampu memberikan BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Volume 6 Nomor 4, November 2021 867 kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat. Selain itu, kunci dari suksesnya konsep smart village adalah dengan menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya smart village ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien, dan sustainable.

Smart Economy

Smart Economy merupakan suatu konsep tata kelola dalam perekonomian yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah terutama pedesaan agar dapat mengikuti tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya (Lasmawan 2019).

Sasaran Smart Economy adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Aktivitas ekonomi

yang ada harus bersifat adaptif yang mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada. Untuk itu, diperlukan peningkatan financial literacy masyarakat melalui berbagai program BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Volume 6 Nomor 4, November 2021 869 pengembangan ekonomi masyarakat. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu: 1. ekosistem industri 2. peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. ekosistem transaksi keuangan

Smart Community

Smart community adalah sebuah konsep gagasan pengembangan sebuah kawasan yang menggabungkan sistem dan infrastruktur teknologi yang berbasis mobile internet dengan tujuan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan di masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan desa. Teknologi informasi hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat yang dituntut berkontribusi dalam pengembangan desa. Implikasinya, masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.





Gambar 2. Foto dokumentasi pengabdian

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- A. Masyarakat Tegalreja telah 'bermigrasi' sebagai desa *Smart Village* dengan memanfaatkan internet sebagai langkah awal dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memiliki website www.tegalreja.desa.id.
- B. Aparatur Desa Tegalreja, telah memiliki kemampuan ketrampilan dalam mengoperasikan website untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Masyarakat Tegalreja, telah memiliki kemampuan dalam berinteraksi untuk kebutuhan administrasi kependudukan serta sumber berita melalui portal milik desa. Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

- A. Pelaksanaan pengabdian dengan fokus pembuatan website di Desa Tegalreja, perlu dilanjutkan kepada desa-desa yang lain untuk mengembangkan potensidesa yang ada.
- B. Pendampingan kepada desa harus terus dilakukan secara berkelanjutan terutama pada pemberian layanan terhadap masyarakat berhubungan administrasi kependudukan, pemasukan berita, maupun pengembangan pada website desa.

Daftar Pustaka

- I. Nursetiawan. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1, April 2020.
- R. Rachmawati. (2018). Pengembangan Smart Village untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, Vol. 1 No. 2.
- S. Sentosa. (2021). Pengembangan Destinasi Wisata Desa Buluh Cina dalam Mewujudkan Smart Village (Desa Cerdas) Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- S.P.H. Sakti, Marzuki dan A.J. Latipah. (2020). Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Smart Village Desa Aikdewa. *Jurnal TEKNIMEDIA*, Vo. 1 No. 1, Mei 2020.
- T. Subekti dan R. Damayanti. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 3 No. 1.
- Anwari. (2018). Pemahaman Pemanfaatan Teknologi Smart Village Di Tingkat Pemerintahan Desa. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 169–172.
- Ardipandanto, A., Ardiyanti, H., Budiman, A., & Sanur, D. (2015). Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Bagi Pelayanan Publik Dan Keamanan Nasional Di Daerah (Pertama; I. Pahlevi, Ed.). Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245.
- Bogor, P. K. (2013). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mendukung Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Bogor. Bogor.
- BPS.(2018). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Letak Geografi, 2003 -2018. Retrieved from BPS website: <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/09/18/00:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html>
- Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2375–2395. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p26>
- Elfina, Wawo, A. B., & Husin. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Pada Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Pada Tugas Dan Regulasi Terhadap Pengelolaan Tugas Dan Regulasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bombana. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 4(1). Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPE>

